

Potensi Fraud Pada Laporan Keuangan Berbasis Fair Value

Nur Ainiyah¹, Marisha Khanida², Yuyun Ristiani³

Universitas Islam Majapahit

nurainiyah0202@gmail.com

Abstract

The concept of fair value in financial statements can increase the level of relevance of financial statements, but in its application it is necessary to estimate or judge someone who is more likely to lean towards a subjective nature and can cause other parties to act fraud. Determination of fair value based on someone's estimation or judgement is a loophole for fraud, which is a gap to increase or decrease the value in the report when an appraiser (appraisal) or auditor takes measurements. The purpose of this research is to find out what causes fair value to be potentially fraudulent in financial statements. This research approach is a descriptive qualitative approach. The result of this research is that fair value can potentially be fraudulent in the Financial Statements. This occur when there is no current price for an asset or property which cause the failure to apply fair value (fair value) so that the valuation becomes less reliable.

Keywords: *Fair Value, Fraud, Financial Statements*

Abstrak

Konsep *fair value* pada laporan keuangan dapat meningkatkan tingkat relevansi dari laporan keuangan, akan tetapi didalam penerapannya diperlukan estimasi atau *judgement* seseorang yang lebih mungkin untuk condong kearah sifat yang subjektif dan dapat menimbulkan pihak lain bertindak *fraud*. Penetapan nilai wajar yang didasarkan pada estimasi atau *judgement* seseorang merupakan celah untuk dilakukannya *fraud*, yaitu celah untuk meningkatkan atau menurunkan nilai dalam pelaporannya ketika seorang penilai (*appraisal*) atau auditor melakukan pengukuran. Tujuan dari terlaksananya penelitian ini yaitu ingin diketahuinya perihal yang menyebabkan *fair value* dapat berpotensi *fraud* pada Laporan Keuangan. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan dengan cara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah *fair value* dapat berpotensi *fraud* pada Laporan Keuangan. Hal ini terjadi apabila tidak tersedianya harga kini atas suatu asset atau property yang menyebabkanagalnya dalam menerapkan *Fair Value* (nilai wajar) sehingga penilaiannya menjadi kurang andal.

Kata Kunci: *Fair Value, Fraud, Laporan Keuangan*

Tanggal Submit : 24 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 28 September 2021

Tanggal Publish : 30 September 2021

A. PENDAHULUAN

Laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan wajib yang harus dibuat oleh perusahaan secara periodik terkait posisi dari keuangan, kinerja dari perusahaan, serta berubahnya posisi dari keuangan perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna dari laporan keuangan terkhusus pada pihak yang memiliki kepentingan yang dijadikan dasar atas pengambilan keputusan. Menurut (Kasmir, 2014) laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan situasi keuangan atas perusahaan sekarang atau dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan definisi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015) adalah salah satu bagian proses dalam melaporkan keuangan dan laporan keuangan merupakan laporan yang cara menyajikannya dilakukan secara runtut dari posisi keuangan suatu perusahaan dan merupakan kinerja atau prestasi dari entitas.

Laporan keuangan dibuat dengan maksud agar informasi keuangan perusahaan dapat sampai kepada pihak-pihak yang berkepentingan dimana didalamnya berisi informasi terkait kinerja perusahaan atau laporan pertanggungjawaban perusahaan atas penggunaan keseluruhan dari sumber daya yang telah diamanahkan kepada perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dijadikan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dalam hal ini manajemen selaku pelaksana kegiatan operasional perusahaan untuk seluruh pihak yang memiliki kepentingan diantaranya investor, bank, kreditur, pemerintah dan lain-lain terkait aktivitas bisnis perusahaan selama satu periode. Sedangkan bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan, laporan keuangan menjadi dasar atau pedoman mengambil keputusan yang akan mereka buat. Oleh sebab itu, dalam membuat laporan keuangan harus terbebas dari yang namanya kesalahan penyajian material yang berakar dari adanya kekeliruan (error) ataupun kecurangan (fraud) agar ketika dilakukan audit atas laporan keuangan mendapatkan opini reasonable assurance yang bebas salah saji.

Standar Pengauditan menyebutkan bahwa hal yang membedakan diantara faktor kecurangan atau kekeliruan yaitu berdasarkan tindakan yang melandasinya apakah berdampak terhadap salah saji atas laporan keuangan karena adanya kesengajaan tindakan ataupun ketidak sengajaan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2001). Kecurangan (Fraud) merupakan tindakan individu atau kelompok dalam manajemen yang melakukannya dengan sengaja dengan tujuan ditipunya pengguna informasi keuangan melalui rekayasa atau disembunyikannya bagian dari pandangan atas laporan keuangan sehingga dapat merubah sebuah keputusan ekonomi dari investor ataupun kreditur. Fraud terjadi disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Berartinya informasi pada laporan keuangan mendorong manajemen agar melakukan tindakan dengan menghalalkan segala cara tujuannya adalah agar laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaannya terlihat bagus kinerjanya sehingga seluruh pihak yang memiliki kepentingan memiliki keyakinan dan puas atas kinerja perusahaan tersebut serta dapat merubah keputusan ekonomi mereka kearah yang positif terhadap perusahaan. Hal tersebut justru memunculkan permasalahan baru bagi perusahaan yaitu adanya risiko baru melalui praktik kecurangan (fraud). Menurut ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Indonesia, selama tahun 2019 fraud di Indonesia sebanyak 239 kasus dan yang paling banyak terjadi dapat dilihat dalam gambar 1.



Sumber : ACFE Indonesia, 2019

Gambar 1 Kejadian Kasus Fraud teratas di Indonesia

Dalam gambar 1 menunjukkan bahwa *fraud* laporan keuangan meskipun terjadi sebanyak 6,7% atau yang paling sedikit kasus yang terjadi, akan tetapi tidak berarti bahwa nilai kerugiannya

yang paling kecil. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 berapa nilai atau jumlah kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* berikut ini.

Tabel 1 Jumlah Kerugian yang diakibatkan Fraud

Nilai atau jumlah Kerugian	Korupsi	Fraud Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan
Rp ≤ 10 juta	48,1 %	67,4 %	63,6 %
Rp 10 juta – 50 juta	4,2 %	2,9 %	3,3 %
Rp 50 juta – 100 juta	8,4 %	5,4 %	8,8 %
Rp 100 juta – 500 juta	11,7 %	6,7 %	9,6 %
Rp 500 juta – 1 Miliar	10,9 %	6,7 %	2,9 %
Rp 1 Miliar – 5 Miliar	5,9 %	3,8 %	3,8 %
Rp 5 Miliar – 10 Miliar	5,4 %	2,1 %	3,4 %
Rp > 10 Miliar	5,4 %	5,0 %	4,6 %

Sumber : ACFE Indonesia, 2019

Konsep *Fair value* diberlakukan pertama kali dalam standar akuntansi internasional pada tahun 2003. Penerapan pembuatan laporan keuangan berbasis *Fair value* dilakukan karena keinginan dari Dewan Standar Akuntansi antara lain ditingkatkannya transparansi investasi, dapat diperbandingkan pada perusahaan yang berada di luar negeri yang masuk dalam daftar di Bursa Efek Amerika, diterapkannya standar akuntansi di internasional berdasarkan nilai sekarang serta untuk mengukur yang paling mendekati keakuratan nilai dari laporan keuangan (Kartomo, 2008). (Barlev & Haddad, 2003) menyebutkan bahwa *Fair value* atau Akuntansi nilai Wajar telah menggantikan paradigma atau model akuntansi yang basisnya adalah biaya historis (*Hystorical cost*). Dewan Pembuat standar Akuntansi melakukan upaya dalam merefleksikan kebutuhan atas pengguna akuntansi keuangan dengan adanya perubahan basis laporan keuangan yang awalnya berbasis biaya historis digantikan dengan *Fair value* yang bertujuan agar dibaliknya pola yang ditunjukkan dengan turunnya relevansi atas informasi keuangan. Pengukuran aset dan kewajiban jika menggunakan *historical book value* maka dalam pengukurannya terdapat asosiasi tertutup dengan *market value*, hal tersebut memunculkan peluang teruntuk manajemen dalam membuat laporan keuangan untuk melakukan tindakan manipulasi laba dan disembunyikannya informasi sebenarnya terkait kurangnya ketercapaian manajemen (Barlev & Haddad, 2003).

Permasalahan baru dengan diberlakukan *Fair value* menurut martin et, al. (2006) adalah bagaimana cara dalam mengendalikan internal terhadap *fair value measurement*, adanya tantangan risiko yang lebih tinggi terkait identifikasi dan evaluasi atas *fair value*, dan dapat menyebabkan menyimpangnya tindakan auditor disebabkan *fair value* yang diperlukan judgement dan estimasi. Kendala yang paling sering terjadi atas diterapkannya *fair value* yaitu objektivitas dalam pengukuran dan ada tidaknya dokumen yang mendukung dalam pengukurannya. Oleh sebab itu, agar pengukurannya tidak subjektif dan tingkat keandalannya dapat terjamin, biasanya bisa menggunakan bantuan pihak ketiga yang independen seperti penilai (*appraisal*), auditor. Tantangannya adalah penetapan nilai wajar oleh penilai (*appraisal*) atau auditor didasarkan pada estimasi atau *judgement* seseorang. Estimasi atau *judgement* seseorang merupakan celah untuk dilakukannya *fraud*, yaitu celah untuk meningkatkan atau menurunkan nilai dalam pelaporannya ketika seorang penilai (*appraisal*) atau auditor melakukan pengukuran. Berdasarkan penjelasan dari uraian tersebut, penulis melakukan penelitian terkait *fair value* dan *fraud* pada laporan keuangan dengan judul **Potensi Fraud Pada Laporan Keuangan Berbasis Fair Value**.

B. TELAAH LITERATUR

1. Agency Theory

Teori keagenan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menyebutkan teori adanya perbedaan keperluan diantara principal dan agen. Timbulnya teori ini bersumber pada perbedaan keperluan, dimana principal memiliki keinginan agar agen bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan principal, sedangkan agen punya keinginan atau kehendak tersendiri yaitu dilakukannya tindakan yang menyebabkan dimaksimalkan nilai dari utilitasnya. Perbedaan tersebutlah yang menimbulkan *agency cost* untuk mengawasi kinerja dari manajemen yang dilakukan oleh principal

terhadap agen. Agen yang dimaksud adalah manajemen dari perusahaan yang sudah diberikan kepercayaan oleh principal untuk menjalankan usahanya. Kewenangan dan otoritas yang diberikan oleh principal terhadap agen sesungguhnya dilaksanakan untuk kepentingan dari principal itu sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya agen lebih cenderung menjalankan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi dari agen tersebut daripada ditingkatkannya nilai dari perusahaan.

Berdasarkan hubungan dari keagenan tersebut, terdapat asimetri informasi yang dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan yang berkepentingan seperti investor dan kreditur. Asimetri informasi yang dimaksud adalah dimilikinya informasi terkait kondisi internal perusahaan yang lebih banyak dan diketahuinya informasi tersebut lebih dulu (lebih cepat) dibandingkan pihak eksternal perusahaan oleh manajemen. Kondisi manajemen yang seperti itu dapat menimbulkan peluang bagi manajemen dalam menggunakan informasi yang ada untuk dilakukannya yang namanya manipulasi laporan keuangan sebagai usaha manajemen dalam memaksimalkan dari apa yang menjadi kepentingannya (Scott, 1997). Dan pada akhirnya konflik kepentingan akan semakin naik sebab principal tidak dapat melakukan monitor kegiatan dari manajemen dalam meyakinkan bahwa manajemen perusahaan dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan kepentingan dari principal.

2. **Laporan Keuangan**

Menurut Menurut (Kasmir, 2014) laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan keadaan keuangan atas perusahaan sekarang atau dalam kurun periode waktu tertentu. Arti dari laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015) adalah salah satu bagian proses dalam melaporkan keuangan dan laporan keuangan merupakan laporan yang cara menyajikannya dilakukan secara runtut atau tersistematis atas posisi keuangan suatu perusahaan dan merupakan kinerja dari entitas.

3. **Fair value**

Menurut (Suwardjono, 2008) *fair value* adalah transaksi yang terjadi diantara beberapa pihak yang memiliki keinginan secara bebas tanpa adanya tekanan ataupun paksaan darimanapun yang menyepakati sejumlah rupiah untuk suatu obyek. (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2013) menyebutkan bahwa, akar atau landasan dari arti *fair value* yaitu perusahaan adalah bagian yang mengoperasikan seterusnya tanpa adanya tujuan (intensi) ataupun harapan agar dilikuidasinya, pembatasan material dalam skala operasinya atau transaksi yang mensyaratkan kerugian. SFAS 157 paragraf 18 dan IFRS 13 memperkenankan terdapat tiga teknik dalam mengukur *fair value* aset atau liabilitas, yaitu :

- a) **Pendekatan Pasar atau *Market Approach*** : pengukuran didasarkan pada harga pasar atau informasi lain yang relevan berdasarkan transaksi di pasar, termasuk harga aset dan liabilitas serupa dalam pasar, serta metode penilaian yang tetap sejalan dengan pendekatan pasar. Urutan dari penggunaan nilai wajar harga pasar yaitu 1) harga saat pelaporan; 2) jika tidak ada harga pada no 1 bisa menggunakan harga pasar sejenis, 3) jika tidak terdapat harga pada no 1 dan 2 bisa digunakan harga dengan model yang tetap (konsisten) dengan pendekatan dari harga pasar tersebut.
- b) **Pendekatan Penghasilan atau *Income Approach*** : penggunaan dari pendekatan ini yaitu dengan teknik penilaian dengan tujuan diubahnya nilai kini yang terdiskonto (*discounted*) dari nilai masa yang akan datang (contoh : aliran kas atau laba). Dasar nilai pengukuran dengan pendekatan ini yaitu dengan melihat harapan terkini dari pasar atas aset dan liabilitas di masa yang akan datang, yang termasuk digunakannya nilai kini yaitu *present value*, *option pricing*.
- c) **Pendekatan Kos atau *Cost Approach*** : pendekatan yang ini adalah pendekatan kos yang mendasarkan nilai atau jumlah sumberdaya yang digunakan dalam penggantian atas kapasitas jasa aset, yang dikenal dengan nama kos pengganti kini (*current replacement cost*). Pendekatan kos merupakan pendekatan yang diukur dengan penerimaan dari sejumlah tertentu untuk penjual atas aset yang memiliki nilai setara terhadap jumlah yang sudah ditentukan dan didasarkan pada biaya yang ditanggung pembeli dalam diperolehnya atau dibangunnya aset pengganti dari aset tersebut dan punya nilai sebanding serta disesuaikan dengan tingkat usang dari aset tersebut baik secara teknik maupun ekonomis.

4. **Fraud**

Menurut (Widjaja, 2011) kecurangan (*fraud*) acuannya adalah adanya kesalahan dalam menyajikan fakta material dan bertujuan untuk ditipunya suatu pihak oleh pihak lain dan

menjadikannya pihak lain tersebut menjadi aman dalam menggantungkan fakta tersebut serta menyebabkan kerugian baginya. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengenalkan 3 kategori dari *Fraud* dengan nama “*Fraud Tree*” yang isinya terkait sistem klasifikasi *fraud* yang berkaitan dengan perihal yang memunculkan kecurangan yang sama (*Uniform Occupational Fraud Classification System*) sebagai berikut :

- a) **Penyimpangan atas asset (*Asset Missappropriation*)** : *fraud* jenis ini lebih ditekankan pada adanya kesalahan dalam penggunaan, dicurinya aset atau harta dari perusahaan oleh pihak lain, dan pendeteksian kategori *fraud* ini merupakan *fraud* yang dapat dilakukan dengan sangat mudah penyebabnya adalah dimilikinya sifat *tangible* atas aset tersebut atau mudahnya dalam pengukuran atau penghitungan (*defined value*).
- b) **Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)** : *fraud* yang terjadi karena adanya suatu tindakan yang merekayasa Keuangan (*financial engineering*) dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan dengan ditutupinya kondisi keuangan yang sesungguhnya oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah dengan maksud diperolehnya keuntungan (*window dressing*).
- c) **Korupsi (*Corruption*)** : *fraud* korupsi merupakan yang paling sulit untuk dilakukan pendeteksian sebab dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak yang bekerjasama dalam menikmati keuntungan tersebut dan memiliki hubungan simbiosis mutualisme seperti menyalahgunakan atas kewewenangan yang dimiliki; adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*); terjadinya suap (*bribery*); adanya penerimaan tidak sah (*illegal gratuities*), dan terjadi pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). Contoh dari *fraud* ini yang sering terjadi adalah suap dan korupsi, 2 hal ini melukiskan 2 kasus yang sering didapati dalam Negara yang berkembang sebab Negara berkembang dalam menegakkan hukumnya masuk dalam kategori lemah dan masih minimnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh kalangan-kalangan yang terkait atas pengelolaan perusahaan yang baik sehingga tingkat integritas yang dimiliki masih menjadi pertanyaan.

Pada umumnya dalam *fraud*, terdapat 3 hal yang menjadi dasar kejadiannya secara bersama, yaitu:

- a) Dilakukan *fraud* karena adanya stimulus (Insentif) atau desakan (tekanan)
- b) Terdapatnya kesempatan dalam melaksanakan *fraud*
Adanya pembenaran tindakan dari *fraud* berupa Sikap atau rasionalisasi.

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan keadaan dari obyek secara alamiah dimana instrument kuncinya adalah peneliti. Sedangkan (Moleong, 2016) mengartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan atas pemahaman fakta terkait pengalaman yang diperoleh oleh pelaku penelitian seperti perilaku, pemahaman, semangat, aksi, dll. Data yang berupa kata ataupun kalimat dan gambar serta bukan data yang berwujud angka, disebut dengan deskriptif (Moleong, 2016). Fokus atas permasalahan yang terjadi merupakan fokus penelitian deskriptif. Dan memperoleh sumber data penelitian dari naskah wawancara dan hasil observasi lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, seta dokumen resmi lainnya.

Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang pelaksanaannya berupa mengumpulkan data-data dengan studi kepustakaan (*Library research*) yang bersumber pada semua buku yang relevan, artikel dari jurnal ilmiah, dan internet. Sugiyono, (2016) menyebutkan studi kepustakaan adalah kajian secara teoritis, penggunaan referensi serta adanya literature ilmiah lainnya terkait budaya, nilai dan norma yang sedang berkembang didalam kondisi sosial yang diteliti. Dan Studi kepustakaan menurut (Jonathan, 2006) didapatkan dengan dipelajarinya berbagai jenis buku referensi serta dari berbagai hasil penelitian sejenis yang sudah terjadi sebelumnya untuk didapatkannya landasan teori terkait permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan

secara deskriptif maka diperoleh kajian-kajian ilmiah terkait tujuan dan sasaran secara eksploratif, serta desain atas riset penelitian eksploratif.

2. Sumber Data

Data Sekunder adalah Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang berasal dari perolehan secara tidak langsung oleh pengumpul data. Data sekunder penelitian ini seperti jurnal-jurnal, buku, artikel, beberapa dari situs internet yang relevan dengan topik penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan data-data diperoleh dengan dikumpulkannya beberapa dokumen yang memiliki keterkaitan serta relevan dengan penelitian dan bersumber dari data sekunder.

4. Analisis Data

Adapun Langkah-langkah dalam menganalisa dari data penelitian ini yaitu :

a) Pengumpulan data

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini. Data-data penelitian tersebut diantaranya seperti buku-buku, jurnal, beberapa situs internet terkait dengan topik penelitian yang sudah ditentukan.

b) Reduksi data

Tahapan awal dari analisis adalah reduksi data. Reduksi data merupakan langkah yang memudahkan penulis dalam memahami data yang sudah diperoleh dengan jalan menyederhanakan, menggolongkan dan mengeluarkan data-data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian sehingga data yang sudah direduksi dapat digambarkan secara jelas oleh penulis yang bertujuan dalam memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap ini dilaksanakan dengan harapan dapat memilih data yang relevan atau tidaknya data terhadap tujuan akhir.

Jadi, mereduksi data diartikan sebagai dirangkumnya, dipilihnya hal-hal yang menjadi pokok permasalahan, dan menfokuskan pada sesuatu hal yang penting. Data penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan yang selanjutnya dirangkum dan dipilih sesuai dengan topik penelitian ini sehingga penulis akan memperoleh gambaran yang jelas terkait penelitian ini.

c) Penyajian data

Langkah setelah adanya reduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilaksanakan dengan jalan kegiatan menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami dalam bentuk teks yang diuraikan secara deskriptif (berwujud catatan kegiatan yang terjadi di lapangan), matriks, grafik, *chart* atau bagan merupakan dasar dalam penggunaan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Oleh sebab itu, setiap data yang diperoleh harus berkaitan erat satu dengan yang lain dan setiap data bisa dipahami. Dalam menyajikan data dilengkapi dengan analisis data yang terdiri atas analisis hasil observasi, yang bertujuan dalam mengorganisasikan dan menyusun data sesuai dengan pola hubungan yang lebih mudah untuk dipahami.

d) Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir analisis data adalah penarikan sebuah kesimpulan dan verifikasi. Tahapan ini dilakukan dengan cara dicari hubungan persamaan, atau perbedaan yang kemudian dibuat sebuah kesimpulan atas jawaban permasalahan yang ada. Kemudian dilakukan verifikasi data yang bertujuan untuk didapatkannya data yang tepat dan objektif. Sebelum menyajikannya dalam bentuk alaporan yang utuh, data harus dianalisa secara cermat dan teliti.

Simpulan dalam penulisan kualitatif deskriptif yaitu diperolehnya sebuah temuan baru yang pada awalnya belum ada, dimana hasil dari temuan tersebut dalam wujud dideskripsikannya atau digambarkannya suatu obyek permasalahan yang pada awalnya masih belum atau kurang jelas menjadi jelas dengan ditelitinya hal tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengukuran Akuntansi Berbasis *Fair Value*

Pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* menurut SFAS 157 dan (IFRS.org, 2016) IFRS 13 "*FV (Fair value) is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date*". Uraian kalimat diatas menjelaskan pengertian dari pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* menurut

IFRS 13 yaitu harga yang diperoleh atas dijualnya suatu aset atau dibayarnya suatu kewajiban atas teraturnya dari sebuah transaksi saat tanggal dilakukan pengukuran diantara pasar. Sedangkan menurut (Suwardjono, 2008) *Fair Value* merupakan kesepakatan transaksi antar beberapa pihak yang berkemauan dalam keadaan bebas dengan tidak adanya tekanan ataupun paksaan atas sejumlah rupiah untuk suatu obyek. Berdasarkan uraian pengertian tersebut, kesimpulannya untuk pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* adalah harga kini atau nilai wajar atas aset yang ditukarkan atau kewajiban yang dibayarkan dalam lokasi dan kondisi serupa.

Pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* ini dipakai dalam mengukur sejumlah satu aset, sekelompok aset, Satu liabilitas, Sekelompok liabilitas, Konsiderasi bersih dari satu atau lebih aset dikurangi satu atau lebih liabilitas terkait, Satu segmen atau divisi dari sebuah entitas, Satu lokasi atau wilayah dari suatu entitas, dan Satu keseluruhan entitas. Ukuran tersebut bukanlah untuk ukuran awal, melainkan untuk pengukuran setelah pengukuran awal yang kemudian disebut dengan saat pelaporan keuangan. Dalam pengukuran awalnya tetap menggunakan penentuan dasar kosnya dari terjadinya suatu transaksi, sedangkan pengukuran seterusnya atau selanjutnya selama aset tersebut dikuasai perusahaan pada saat pelaporan keuangannya perusahaan bisa memilih berdasarkan kos historis ataukah menggunakan *Fair Value*. Hal tersebut sudah selaras dengan peraturan yang tertera dalam (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007) PSAK No 16 (Revisi 2007) yang menyebutkan bahwa secara berkala metode revaluasian atas pengukuran aset menggunakan nilai wajar setelah adanya pengukuran awal.

Pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* telah berhasil menggantikan kedudukan atas pengukuran akuntansi berbasis biaya historis (*Hystorical cost*). Hal ini disebabkan karena pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* mampu mengukur laporan keuangan dengan hasil nilai yang lebih akurat dibandingkan dengan kos historis. Pengukuran akuntansi berbasis biaya historis (*Hystorical cost*) menimbulkan adanya keraguan atas relevansi nilai dan kebermanfaatan atau kegunaan suatu laporan keuangan. Tidak relevannya lagi Pengukuran akuntansi berbasis biaya historis (*Hystorical cost*) disebabkan karena biaya historis pengukurannya menitik beratkan pada pengukuran selesainya dari transaksi, sehingga dalam pengakuannya tidak dapat diakui perubahan nilai riil yang terjadi. Misalnya terjadinya penurunan nilai dari suatu pos dalam pasar yang diakibatkan adanya inflasi atau deflasi, kelangkaan dari sebuah produk dan masih banyak hal lainnya sehingga dalam pelaporan dari posnya tidak akan dapat mencerminkan kondisi atas nilai yang berubah tersebut.

Lemahnya akan pengukuran akuntansi berbasis kos historis tersebut maka, dengan adanya pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* dapat mengatasi kelemahan tersebut dengan jalan mampu dijelaskannya kondisi secara riil atas laporan keuangan yang terekam khususnya neraca kepada para pengguna laporan keuangan. Harapan akan mampu dijelaskannya situasi atau kondisi yang lebih riil tentang jumlah yang tercatat dalam neraca kepada para pengguna laporan keuangan dengan diterapkannya Pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* disebabkan karena sudah sesuainya laporan keuangan dengan situasi pasar pada saat pelaporan (Sukendar, 2012). Informasi laporan keuangan yang andal akan mempermudah seorang investor dalam memberikan penilaian atas aturan baru yang diterapkan dalam perusahaan guna membantu dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun demikian Pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* dalam penerapannya masih menimbulkan perdebatan sehingga memunculkan dua pendapat diantaranya pendapat yang setuju (pro) dan pendapat yang tidak setuju atau menentanng (kontra) atas penerapan tersebut. Bagi yang pendapat yang setuju (pro) terhadap penerapan dari Pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* berpendapat bahwa dengan diterapkannya pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* membuat peningkatan dari relevansi atas informasi akuntansi sebab nilai aset dan liabilitas dari perusahaan menunjukkan informasi kini yaitu didasarkan pada harga pasar saat pelaporan (Barth, 2006) dan (Linsmeier, 2011). Nilai kini atas aset dan liabilitas tersebut merupakan nilai pasar atau nilai wajar yang relevansinya mampu dalam memberikan prediksi atas kondisi keuangan dari perusahaan di periode selanjutnya. *Fair Value* atau nilai wajar yang dapat digunakan sebagai acuan terbaik yaitu nilai yang didasarkan pada harga kini dalam pasar aktif atas *asset* atau *property* yang sejenis dalam tempat dan kondisi yang sejenis juga. Artinya *Fair Value* (nilai wajar) yang digunakan dalam pengukuran adalah harga pertukaran (*exit price*) dari aset atau liabilitas bukan *entry price* dari aset atau liabilitas. Hal tersebut diperkuat dengan adanya SFAS 157 dan IFRS 13 yaitu *Fair Value* atau

nilai wajar dalam pengukurannya berdasarkan harga pasar atau berbasis pasar yang dikenal dengan nama *market based measurement*. *Fair Value measurement* (pengukuran nilai wajar) diasumsikan harga pasar yang digunakan adalah harga pasar aktif.

Kelemahan dari harga pasar aktif ini adalah tidak tentunya atas kesediaan dari harga pasar tersebut di pasar. Dalam kondisi dan situasi tidak tersedianya harga pasar atas suatu aset atau *property* maka perusahaan dapat menggunakan *Fair Value* atau nilai wajar dengan pertimbangan sebagai berikut (1) harga kini dalam pasar aktif atas aset atau *property* sejenis dalam lokasi yang berbeda, selanjutnya dapat disesuaikan dengan lokasi yang berbeda tersebut; (2) harga terakhir atas aset atau *property* sejenis di pasar yang kurang aktif yang disesuaikan agar tercerminkannya atas perubahan kondisi ekonomi dimulai dari terjadinya tanggal transaksi pada harga tersebut; (3) digunakannya tingkat diskonto dalam menilai estimasi atau perkiraan dari arus kas masa depan atau metode *discounted cash flow* agar tercerminnya resiko dari jumlah dan waktu arus kas karena tidak adanya kepastian.

PSAK 68 dalam (Palasari, 2018) menyebutkan bahwa *Fair Value* atau nilai wajar terdapat 3 level tingkatannya, antara lain :

- a) Input Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif atas aset dan liabilitas yang sejenis dan dapat diakses oleh perusahaan pada saat tanggal pengukuran. Contoh : diukurnya nilai wajar dari saham didasarkan pada harga bursa saham
- b) Input Level 2 : penginputan selain dari harga kuotasian yang masuk dalam kategori level 1 atas aset dan liabilitas, baik secara langsung ataupun tidak. Berikut beberapa kategori input level 2 : (1) harga kuotasian atas aset dan liabilitas sejenis dalam pasar aktif; (2) harga kuotasian atas aset dan liabilitas yang identik / sejenis dalam pasar tidak aktif. Contoh : diukurnya nilai wajar dari tanah dan bangunan.
- c) Input Level 3 : input atas aset atau liabilitas yang tidak dapat diobservasi. Jenis input yang digunakan pada level ini yaitu model penilaian internal, dimana umumnya penilaian yang didasarkan pada teknik dan metode penilaian yang diakui sebagai standar industri. Contoh : nilai wajar dari kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah yaitu digunakan nilai kini yang didasarkan atas arus kontraktual dengan dipertimbangkannya kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Sedangkan bagi yang kontra terhadap penerapan dari pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* berpendapat bahwa dengan diterapkannya Pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* dapat terciptanya volatilitas laba tanpa perlu adanya peningkatan atas informasi yang relevan. Volatilitas laba merupakan tingkat kondisi berfluktuasinya laba perusahaan yang berasal dari kegiatan operasionalnya selama beberapa periode. Hal ini bisa saja terjadi karena jika dilihat secara konseptual mungkin pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* lebih baik dibandingkan dengan pengukuran akuntansi berbasis kos historis, akan tetapi bisa saja dalam penerapannya terjadi kegagalan dan seluruh penilaiannya menjadi kurang andal. Kegagalan tersebut terjadi karena adanya perkiraan dan asumsi yang salah dari manajemen atas nilai dari aset dan liabilitas perusahaan sebab nilai wajar aset dan liabilitas tidak dapat didefinisikan secara jelas sehingga manajemen harus menentukan nilai aset dan liabilitas yang masih ambigu dan tidak dapat merefleksikan kondisi dari perusahaan. Penentuan nilai wajar yang didasarkan pada kurang tepatnya dalam memperkirakan dan mengasumsikan dapat menimbulkan peluang bagi manajemen dalam memperoleh keuntungan atas penilaian tersebut dengan cara dilakukannya manipulasi yang dan mengelola angka nilai tersebut agar tercapainya tujuan manajemen yaitu angka atas pendapatan yang diharapkan yang berdampak terhadap volatilitas dari laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut tentunya mempersulir dalam memastikan jumlah laba dan rugi dari perusahaan sebab dalam proses pengambilan bisnis yang dipilih oleh manajemen atau dengan adanya berubah-ubahnya nilai dari pasar.

Pengukuran akuntansi berbasis *Fair Value* membuka peluang bagi jasa *appraisal* (penilai) untuk terlibat dalam pengukuran nilai tersebut. Digunakannya jasa *appraisal* (penilai) meminimalisir ketakutan dan kesalahan dalam menilai aset dan liabilitas dari perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan tetap harus mempertimbangkan *cost* dan *benefit*, serta keputusan final dari hasil penilaian atas jasa *appraisal* yang bergantung kepada kebijakan dari manajemen. Selain itu dampak terbesar atas dasar penentuan nilai wajar yang kurang jelas dapat menimbulkan terjadinya *fraud*.

2. **Fraud Pada Laporan Keuangan**

Fraud (kecurangan) Menurut (Widjaja, 2011) merupakan kesalahan dalam menyajikan fakta yang dianggap material dan dilakukan oleh satu pihak ke pihak lainnya dengan maksud untuk ditipunya dan dibuatnya pihak lain merasa aman dengan adanya ketergantungan terhadap fakta yang menyebabkan dirugikannya mereka. (BAI et al., 2008) yang mengartikan *Fraud* (kecurangan) sebagai kesengajaan tindakan yang berakibat sesatnya laporan keuangan secara maksimal. (Mark & et all, 2017) menyebutkan *Fraud* (kecurangan) adalah kesalahan atas representasi yang dilakukan dengan berbagai cara tindakan yang dapat menipu orang lain dengan tujuan untuk diperolehnya keuntungan yang lebih dari orang lain. Berdasarkan definisi diatas, kesimpulan atas definisi dari *Fraud* (kecurangan) adalah ketidakjujuran atas suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bermaksud agar dapat ditipunya atau dibohonginya orang lain untuk diperolehnya keuntungan.

Disebut dengan *Fraud* apabila memenuhi kriteria berikut ini antara lain (1) adanya salah memberikan pernyataan (*misrepresentation*); (2) berasal dari permasalahan masa lampau (*past*) dan sekarang (*present*); (3) bersifat material; (4) melakukan dengan sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*). Kecurangan ada 2 jenis tipe yaitu kecurangan eksternal (kecurangan yang terjadi karena dijalankan oleh kalangan diluar perusahaan) dan kecurangan internal (kecurangan yang terjadi karena dilakukan oleh pihak dalam perusahaan). (Marks, 2014) menjelaskan bahwa marks mengembangkan teori *Fraud triangle* dari Cressey 1953 yang menyebutkan terdapat tiga elemen *Fraud triangle* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) sudah tidak memadai dalam memberikan penjelasan atas perilaku kecurangan yang terjadi sehingga ditambahkan lagi 2 elemen yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*) yang dikenal dengan *crowe fraud pentagon*. Elemen tekanan (*pressure*) merupakan elemen yang disebabkan karena terdapatnya motif untuk dilakukannya dan disembunyikannya suatu kecurangan; kesempatan (*opportunity*) merupakan elemen yang disebabkan karena lemahnya suatu pengendalian yang menimbulkan kesempatan dalam melakukan kecurangan; Elemen rasionalisasi (*rationalization*) adalah elemen yang terjadi dikarenakan adanya pembenaran rencana atau yang sudah terjadi atas kecurangan; elemen kompetensi (*competence*) yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dengan dikesampingkannya atau diabaikannya pengendalian internal, dikembangkan strategi yang canggih dalam menyembunyikan dan dikendalikannya situasi sosial agar dapat diperolehnya keuntungan yang dijual kepada orang lain; dan elemen yang terakhir adalah arogansi (*arrogance*) dimana munculnya sikap superioritas dalam diri seseorang yang berkeyakinan bahwa tidak berlakunya kontrol internal atau kebijakan perusahaan pada dirinya.

Klasifikasi *fraud* menurut (Association Of Certified Fraud Examiners, 2018) yang digambarkan dalam istilah *Fraud Tree* yaitu :

a) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Fraud yang mudah dalam pendeteksian karena dapat diukur (*defined value*) dan sifatnya berwujud (*tangible*) seperti pencurian dan penggelapan aset yang dilakukan secara ilegal oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan aset ataupun yang berasal dari luar pihak perusahaan.

b) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)

Fraud yang dilakukan dengan adanya rekayasa keuangan saat menyajikan laporan keuangan agar diperoleh keuntungan (*window dressing*) oleh pejabat atau eksekutif dari perusahaan atau instansi pemerintah dalam menutupi kondisi keuangan yang sesungguhnya seperti dilakukannya input faktur palsu.

c) Korupsi (*corruption*)

Fraud jenis ini merupakan *fraud* yang sering terjadi di negara berkembang yang lemah akan hukum dan minimnya tingkat kesadaran akan pengelolaan yang baik. Selain itu, *fraud* ini menggambarkan *fraud* yang teramat sulit untuk ditemukan atau diivensi dikarenakan melibatkan banyak pihak bukan hanya satu orang yang mengambil keuntungan seperti penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah atau ilegal dan pemerasan secara ekonomi (*illegal gratuities, dan economic extortion*).

Fraud terjadi disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adanya :

- a) Keserakahan,: adanya sikap yang ingin memiliki segalanya membuat seseorang bisa melakukan kecurangan, oleh sebab itu perusahaan harus menjelaskan atau menetapkan batasan-batasan yang ada
- b) Kesempatan: kesempatan dalam melakukan kecurangan berlaku untuk semua jenis kedudukan, hanya saja besarnya kesempatan biasanya terjadi pada posisi manajemen daripada posisi karyawan sebab manajemen lebih memiliki kekuasaan pengendalian dan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan sehingga kesempatan untuk melakukan *fraud* juga akan semakin besar sehingga diperlukan pengendalian dari segala arah yang bisa mengingatkan atau mengendalikan satu sama lain.
- c) Kebutuhan: tingginya kebutuhan seseorang bisa menimbulkan terjadinya kecurangan. Oleh sebab itu perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan semua pihak baik itu internal maupun eksternal perusahaan.
- d) Pengungkapan: kecurangan yang pernah terjadi tidak akan menjamin untuk tidak diulangi lagi baik itu oleh pelaku yang sama ataupun yang berbeda, oleh sebab itu pelaku kecurangan semestinya diberikan hukuman yang tegas andaikata tersingkap.

Fraud (kecurangan) dalam laporan keuangan dapat berupa: 1) *earning management* merupakan upaya dari manajemen dengan terjadinya pengaturan profit atau laba perusahaan yang erat kaitannya dengan ditingkatkannya laba perusahaan dengan tujuan agar kinerja perusahaan terlihat bagus sehingga prestasi manajemen juga terlihat bagus; 2) *Income smoothing* merupakan perataan laba yang dilakukan oleh manajemen untuk menyeimbangkan laba yang diperoleh perusahaan. (Wells, 2011) menyebutkan beberapa modus yang tercakup dalam kecurangan laporan keuangan antara lain :

- a) Dipalsunya, diubahnya atau dimanipulasinya catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
 - b) Dihilangkannya dengan sengaja peristiwa, transaksi, akun, atau informasi yang signifikan lainnya yang dijadikan sumber dari penyajian atas laporan keuangan.
 - c) Kesalahan dalam penerapan dan disengajanya atas prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang dipakai dalam pengukuran, pengakuan, pelaporan dan pengungkapan atas peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
- Kesengajaan yang dilakukan dengan dihilangkannya informasi yang harusnya disajikan dan diungkapkan terkait prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Potensi *Fraud* Pada Laporan Keuangan Berbasis *Fair Value*

Setiap perusahaan diberikan kebebasan dalam menjalankan bisnisnya serta mengoptimalkan bisnisnya secara penuh dimulai dari input, proses sampai dengan output. Begitupula dengan pelaporan keuangan perusahaan, perusahaan juga bebas dalam membuat pelaporan keuangan perusahaan yang penting tidak menyimpang dari aturan pelaporan keuangan itu sendiri. Aturan dalam pelaporan keuangan dibuat agar perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan tidak melakukan yang namanya kecurangan (*fraud*). Terjadinya *fraud* dapat merugikan semua kalangan yang berhubungan terhadap perusahaan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi yang handal yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Aturan-aturan yang sudah dibuat oleh dewan standar akuntansi yang berwujud standar akuntansi ditujukan agar laporan keuangan perusahaan memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas tinggi serta memiliki keterbandingan atas laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan standar global yang dimungkinkan untuk keterbandingan dan ditukarnya informasi secara umum (universal) melalui pengembangan prinsip akuntansi salah satunya adalah IFRS. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi laporan keuangan perusahaan di Indonesia sebab standar tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Negara. Beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya konvergensi IFRS yaitu berkurangnya hambatan-hambatan investasi, meningkatnya transparansi perusahaan, berkurangnya biaya terkait penyusunan laporan keuangan dan berkurangnya *cost of capital*. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya standar global, perusahaan yang memiliki beberapa cabang dinegara yang berbeda tidak perlu lagi menyesuaikan laporannya sesuai dengan letak Negara dimana cabang perusahaan tersebut berada sebab laporannya sudah terstandar secara global.

Salah satu Prinsip akuntansi IFRS yang dikembangkan secara global yaitu *Fair Value* (pengukuran nilai wajar) atas suatu aset, *property* ataupun kewajiban dari perusahaan. Konsep *Fair Value* (nilai wajar) dirancang dan diberlakukan secara luas kepada perusahaan diseluruh dunia untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan tersebut menjadi perusahaan global. Tahun 2008 merupakan tahun dimulainya Negara Indonesia mengadopsi *Fair Value* (pengukuran nilai wajar) dan pengadopsian secara penuh dilakukan pada tahun 2012. IAS atau IFRS menyatakan bahwa *Fair Value* (pengukuran nilai wajar) secara konsisten. Di Indonesia baru 11 PSAK yang menyatakan menggunakan nilai wajar dari total keseluruhan PSAK yang berlaku, yaitu PSAK 50, 55 dan 60 saja yang menyatakan nilai wajar yang identik sedangkan 9 PSAK lainnya tidak memuat definisi nilai wajar yang sama. Sebelum diterapkannya *Fair Value* (nilai wajar) didalam perusahaan, perusahaan perlu memahami 5 hal agar bisa beradaptasi dengan *Fair Value* (nilai wajar) diantaranya : (1) dipahami dan didalamnya konsep *Fair Value* (nilai wajar); (2) perusahaan membuat analisa jarak (*gap analysis*) supaya memahami konsep *Fair Value* (nilai wajar) dan menghilangkan gap diantara praktek sebelumnya dengan konsep *Fair Value* (nilai wajar) yang sekarang; (3) disusunnya sistem informasi untuk mengakomodasi diterapkannya standar baru; (4) diperbaikinya sistem teknologi informasi dalam mengakomodasi penerapan nilai wajar; dan (5) dilakukan percobaan dengan *parallel run* sampai memiliki keyakinan sistem yang terbaru siap untuk diterapkan.

Fair Value (nilai wajar) yang dapat digunakan sebagai acuan terbaik adalah nilai yang didasarkan pada harga kini dalam pasar aktif atas aset atau *property* yang sejenis dalam tempat dan kondisi yang sejenis juga. Artinya *Fair Value* (nilai wajar) yang digunakan dalam pengukuran adalah harga pertukaran (*exit price*) bukan *entry price*. Harga pertukaran yang digunakan untuk Penentuan *Fair Value* (nilai wajar) dari aset dan liabilitas yang terdapat dalam pasar harga aktif ini tidak serta merta dapat langsung diterapkan nilainya begitu saja, akan tetapi dalam penentuan nilainya perlu diperhatikan beberapa kondisi dari aset dan liabilitas tersebut berdasarkan tingkatan level dari penentuan *Fair Value* (nilai wajar) dari aset dan liabilitas tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Palasari, 2018) yang menyebutkan bahwa dalam PSAK 68 *Fair Value* atau nilai wajar terdapat 3 level tingkatan yaitu level 1, 2 dan 3. Level tersebut dijadikan acuan dalam penentuan harganya sesuai kondisi yang dipersyaratkan dari tiap level yang sudah dijelaskan diatas.

Akuntansi *Fair Value* (nilai wajar) didasarkan pada harga kini dalam pasar aktif menyebabkan tidak tentunya atas kesediaan dari harga pasar atas suatu aset atau *property* yang berpotensi terjadinya *Fraud* (kecurangan). Seperti yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, adanya Kondisi pandemi Covid-19 yang mengguncang seluruh Negara di dunia menyebabkan harga-harga dalam pasar aktif dari aset dan liabilitas mengalami fluktuatif harga yang signifikan sehingga perusahaan kesulitan dalam menerapkan harga *Fair Value* (nilai wajar) dari aset dan liabilitas tersebut. Sebagai contoh misalnya Rumah Sakit yang mendapatkan bantuan alat-alat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 seperti baju APD (Alat Pelindung Diri) yang terdiri atas baju, kacamata, sarung tangan, dan lain sebagainya; swab kit dan tes kit covid-19; serta masker N95 dan masker bedah. Akuntan dari Rumah sakit ataupun manajemen tersebut akan kesulitan dalam menerapkan harga *Fair Value* (nilai wajar) dari alat-alat tersebut sebab pada saat penerimaan bantuan tersebut terjadi kondisi pandemi Covid-19 dimana harga dari alat-alat tersebut mengalami fluktuatif harga yang signifikan. Misalnya harga masker medis sebelum pandemi Covid-19 1 box Cuma Rp 50.000 sekarang diantara beberapa toko yang menawarkan, ada yang memberikan harga Rp 300.000, Rp 450.000, Rp 500.000 sehingga harganya bervariasi yaitu dikisaran harga Rp 300.000 – 500.000. Bervariasinya harga suatu aset atau liabilitas tentunya menyulitkan bagi pihak manajemen perusahaan ataupun apasial dalam menentukan harga aset tersebut sebab dalam menentukan harga baik itu pihak manajemen dan appraisal lebih mungkin untuk menilai secara subjektif terhadap aset atau liabilitas tersebut dibandingkan penilaian yang objektif yang pada akhirnya berakibat pada penentuan harga yang salah.

Kesalahan dalam penentuan harga *Fair Value* (nilai wajar) dapat menyebabkan terjadinya *fraud* dalam suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena gagalnya dalam menerapkan *Fair Value* (nilai wajar) sehingga penilaiannya menjadi kurang andal. Penyebab kegagalannya adalah adanya perkiraan dan asumsi yang salah dari manajemen atas nilai dari aset dan *liabilitas* perusahaan sebab nilai wajar aset dan *liabilitas* tidak dapat didefinisikan secara jelas sehingga manajemen harus

menentukan nilai aset dan liabilitas yang masih ambigu dan tidak dapat merefleksikan kondisi dari perusahaan. Penentuan nilai wajar yang didasarkan pada prakira dan asumsi yang kurang tepat membuat celah bagi manajemen yang besar kemungkinannya untuk melakukan manipulasi dan mengelola angka nilai dari pendapatan perusahaan tersebut sehingga pendapatan perusahaan mengalami peningkatan. Meningkatnya angka atas pendapatan perusahaan membuat penilaian kinerja manajemen dianggap baik dalam mengelola perusahaan dan hal tersebut berakibat pada sesatnya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Selain itu, dampak lain yang terjadi terhadap perusahaan adalah volatilitas laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut tentunya akan mempersulit dalam memastikan jumlah laba dan rugi dari perusahaan sebab dalam proses pengambilan bisnis yang dipilih oleh manajemen atau dengan adanya berubah-ubahnya nilai dari pasar. Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sangat jelas terlihat bahwa harga pasar aktif merupakan arah penentu dari keberhasilan penerapan harga *Fair Value* (nilai wajar) atas aset dan liabilitas perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriana & Aviyanti, 2019) yaitu Akuntansi nilai Wajar memiliki faktor pendukung utama yaitu kondisi pasar. Jika kondisi pasar aktif, maka penerapan Akuntansi Nilai Wajar dapat berjalan secara maksimal karena situasi pasar aktif dapat memberikan informasi yang relevan dan reliable.

Biaya historis sendiri pada prinsipnya tidak dapat memberikan kepastian atas cerminan biaya yang sesungguhnya terjadi. Penentuan harga real dari *historical cost* memang mudah diperoleh selama catatannya masih disimpan. Pengukuran biaya historis dalam jangka pendek kebermanfaatannya masih bisa diandalkan, akan tetapi berbeda lagi pada kondisi jangka panjang yang keandalannya tidak sepenuhnya bermanfaat. Seperti misalnya ada kondisi inflasi ataupun deflasi maka harga aset dan liabilitas tersebut tidak dapat memberikan gambaran harga pasar pada kondisi tersebut. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap harga aset dan liabilitas tersebut untuk menyesuaikan biaya inflasi atau biaya penggantian atas aset dan liabilitas.

Penerapan atas *Fair Value* (nilai wajar) sendiri memiliki 2 dampak terhadap perusahaan yaitu kebaikan dan keburukan. Dampak kebaikan dengan diterapkannya *Fair Value* (nilai wajar) yaitu laporan keuangan lebih relevance dalam artian dalam laporan keuangan harus diungkapkan kejadian yang dapat merubah masa kapan arus kas diterima serta nilainya kelak untuk mempercayai nilai riil yang terjadi yang tidak mampu dijelaskan oleh *historical cost* karena memperkirakan transaksi dari kejadian yang sudah terjadi; dan *reliability* dalam artian diakuinya perubahan nilai yang bersifat ekonomis sehingga tidak memperburuk kenetralan dan dipercayainya informasi keuangan. Sedangkan keburukannya yaitu karena *Fair Value* berusaha memberikan informasi yang transparan dalam menilai aset pada tingkat harga yang dihasilkan apabila dilaksanakan likuidasi secara segera yang menyebabkan nilainya sangat sensitive terhadap pasar; akuntansi *Fair Value* (nilai wajar) bekerja dengan pendekatan M to M (*Mark To Market*) maka harga aset dan liabilitas yang tercantum secara terbuka berakibat seringnya perubahan pada laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan sulitnya memberikan kepastian terkait laba dan rugi yang dibuat manajemen; dan volatility yaitu volatility kinerja perusahaan yang disebabkan *Fair Value* (nilai wajar) sebab berfluktuasinya harga aset dan kewajiban di pasar.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang ada dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu *fair value* dapat berpotensi *fraud* pada Laporan Keuangan. Hal ini terjadi apabila tidak tersedianya harga pasar atau harga kini atas suatu aset atau *liabilitas* yang menyebabkan gagalnya dalam menerapkan *Fair Value* (nilai wajar) sehingga penilaiannya menjadi kurang andal. Tidak adanya adanya harga pasar atau harga kini dari aset dan *liabilitas* menyebabkan dibuatnya perkiraan dan asumsi yang salah dari manajemen atas nilai dari aset dan *liabilitas* perusahaan sebab nilai wajar aset dan *liabilitas* tidak dapat didefinisikan secara jelas sehingga manajemen harus menentukan nilai aset dan *liabilitas* yang masih ambigu dan tidak dapat merefleksikan kondisi dari perusahaan. Penentuan nilai wajar atas dasar prakira dan asumsi yang kurang tepat membuat celah bagi manajemen dalam melakukan manipulasi dan mengelola angka nilai tersebut sesuai keinginan manajemen yaitu diharapkannya kinerja perusahaan yang baik. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan volatilitas pada laporan keuangan perusahaan.

2. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk dapat menambah alat ukur dalam mengaitkan antara variabel *fair value* (nilai wajar) yang berpotensi *fraud* pada laporan keuangan, menggunakan pendekatan penelitian lain seperti kuantitatif. Serta menambahkan beberapa kebijakan terkait penerapan *fair value* (nilai wajar) pada beberapa Negara.

REFERENCES

- Association Of Certified Fraud Examiners. (2018). *Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. Report To The Nations.
- BAI, B., YEN, J., & Yang, X. (2008). False Financial Statements: Characteristics of China's Listed Companies and Chart Detecting Approach. *International Journal of Information Technology and Decision Making*, 7 (2), 339–359. <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219622008002958>
- Barlev, B., & Haddad, J. R. (2003). Fair value accounting and the management of the firm. *Critical Perspectives on Accounting*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1045-2354\(02\)00139-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1045-2354(02)00139-9)
- Barth, M. (2006). Including estimates of the future in today's financial statements. *Accounting Horizons*, 20 (3), 271–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/acch.2006.20.3.271>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2007). *PSAK No. 16 (revisi 2007): Aset Tetap* (IAI (ed.); revisi 200). Salemba Empat.
- Fajriana, N., & Aviyanti, R. D. (2019). Akuntansi Nilai Wajar: Perdebatan yang Tidak Berujung. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.3486>
- IFRS.org. (2016). *IFRS - Who uses IFRS Standards? IFRS Standard Filing Profile Project*. www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrsstandards-by-jurisdiction/
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2001). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2013). *buletin teknis*. No.3, Paragraf PA 84.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Jurnal MAKSI*, Vol. 5, No. 2, Vol. 5, No.
- Jonathan, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Kartomo, R. (2008). *Transformasi Penerapan Nilai Wajar (Fair Value) & Implikasinya*.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revi). PT. Raja Grafindo Persada.
- Linsmeier, T. (2011). Financial reporting and financial crises: The case for measuring financial instruments at fair value in the financial statements. *Accounting Horizons*, 25(2), 409–417. <https://doi.org/10.2308/acch-10024>
- Mark, F., & et all. (2017). *Forensic Accounting*.
- Marks, J. T. (2014). *Playing offense in a high-risk environment*. *Crowe Horwath*, 94(8), 14. <http://0search.ebscohost.com.wam.city.ac.uk/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=44618947&sit e=ehostlive>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Palasari, D. (2018). PENGARUH PENERAPAN FAIR VALUE ACCOUNTING TERHADAP INDIKASI MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Keuangan Dan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016). *Director*, 15(40), 6–13. [http://awsassets.wwfnz.panda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf%0Ahttp://hdl.handle.net/10239/131%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://ww](http://awsassets.wwfnz.panda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf%0Ahttp://hdl.handle.net/10239/131%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://ww)

- Scott, W. R. (1997). *Financial Accounting Theory* (Internatio). New Jersey:Prentice-Hall, Inc.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukendar, H. (2012). Konsep Nilai Wajar (Fair Value) dalam Standar Akuntansi Berbasis IFRS di Indonesia Apa dan Bagaimana? *Binus Business Review*. *Binus Business Review*, VOL. 3 NO., 93–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1286>
- Suwardjono. (2008). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Jogjakarta: BPFE.
- Wells, J. T. (2011). *Principles of fraud examination* (3 edition). Wiley & Sons, Inc.
- Widjaja, A. (2011). *Accounting Fraud*. Jakarta: Harvarindo.